

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah memberikan evaluasi terhadap laporan realisasi pendapatan yang diajukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah agar potensi-potensi pajak daerah, retribusi dan pendapatan-pendapatan lain yang sah dikelola secara optimal, yaitu dengan cara menitikberatkan pada pelaksanaan beberapa tugas pokok yang dianggap berpengaruh serta mempunyai efek terhadap perkembangan dan peningkatan pendapatan daerah. Tugas pokok tersebut ialah:
 - a) Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, evaluasi dan pengembangan terhadap objek pendapatan baru;
 - b) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan daerah;
 - c) Pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; dan
 - d) Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, pengolahan, pendokumentasian data Pajak, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Tugas-tugas pokok diatas dinilai selama ini pelaksanaannya terhitung masih kurang, untuk itu kerja secara profesional dan keaktifan sangat diperlukan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun hambatan yang masih sering terjadi yaitu:

- a) Kurangnya koordinasi antara Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan SKPD yang akan menimbulkan permasalahan. Sehingga mengakibatkan ketidakstabilan presentase data yang akan dimasukkan.
- b) Data-data yang kurang valid yang didapatkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat menghambat dilakukannya inventarisasi pada proses laporan keaungan daerah.
- c) Faktor profesionalisme SDM, masih ada pembagian tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Sebenarnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mempunyai komitmen untuk meningkatkan PAD, tetapi belum ada inovasi.
- d) Masih lemahnya penegakan huum bagi wajib pajak yang tidak mentaati peraturan, kurangnya informasi dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak. Keterlambatan dalam membayar pajak menjadi masalah yang paling sering terjadi, sehingga hal

tersebut menyebabkan permasalahan bagi petugas administrasi dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

- e) Masih belum optimalnya upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dalam rangka mendukung peningkatan PAD.

Faktor-faktor pendukung antara lain:

- a) Membantu melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dalam bentuk penagihan, penggalian objek pajak baru, pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b) Pengadaan evaluasi pendapatan secara periode terhadap pendapatan yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain.
- c) Selaku SKPD penyusun laporan konsolidasian pemerintah daerah melakukan sosialisasi pelatihan dan pendampingan kepada SKPD.
- d) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi membayar pajak.
- e) Peninjauan Peraturan Daerah (PERDA) yang sudah ada, untuk dirubah sesuai dengan perkembangan keadaan.

B. SARAN

1. Diharapkan BAPPENDA melakukan pembinaan berupa pelatihan berbasis kompetensi terhadap petugas/pegawai yang bertugas memungut dan melakukan pendapatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pelatihan dapat diselenggarakan melalui kerjasama dengan badan diklat Pemerintah Provinsi.
2. Diharapkan BAPPENDA memperbaiki koordinasi dengan SKPD terkait masalah pendataan dan pelaporan mengenai pendapatan daerah. Perlunya diberlakukan sanksi kepada SKPD jika ada yang terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Adanya penegakan hukum yaitu berupa sanksi kepada wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran. Diharapkan juga adanya sistem jemput bola terhadap wajib pajak, guna meminimalisir keterlambatan bayar pajak bagi wajib pajak.
4. Diharapkan BAPPENDA harus bisa memanfaatkan kondisi Kabupaten Kota Waringin Timur yang semakin berkembang baik dari segi pariwisata, perdagangan maupun industri, dan menggali potensi pajaknya.